

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Kota Lubuksikaping tidak terlepas dari berkembangnya Kabupaten Pasaman. Lubuksikaping tidak hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat bagi kegiatan perekonomian di Kabupaten Pasaman.¹ Sejak otonomi daerah perkembangan Kota Lubuksikaping menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan atau pesat. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan fisik kota, jumlah penduduk dan dinamika sosial budayanya. Di kota ini terdapat berbagai sarana perkotaan, seperti PDAM, PLN, jalan raya, telekomunikasi, penginapan, villa, perumahan, bank, pasar, terminal, sarana kesehatan, kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan sebagainya.²

Perkembangan pesat Kota Lubuksikaping ini cukup mengejutkan. Karena pada tahun 2000an terjadi pemekaran daerah Kabupaten Pasaman dipecah menjadi dua menjadi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemecahan ini mestinya membuat Kota Lubuksikaping menjadi sepi, karena adanya perpindahan pegawai dan dana pembangunan dibagi menjadi dua akan tetapi, faktanya Kota Lubuksikaping semakin ramai dan semakin maju.

¹ Dawis Lubis, "*Kebijakan Strategis Pembangunan Kabupaten Pasaman*" Pasaman Saiyo, 2012, hal. 10

² Pemda Kabupaten Pasaman. *Perencanaan Detail Tata Ruang Kota Lubuksikaping Tahun 2006* (Lubuksikaping: Bapeda), hal. 22-23

Ada indikasi bahwa perkembangan Kota Lubuksikaping yang semakin maju tersebut disebabkan oleh besarnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman. Terutama sejak Pasaman dipimpin oleh Bupati Baharrudin pada tahun 2000, dan Baharudin berasal dari daerah Talu, dan wakil bupatinya yaitu Benny Utama yang berasal dari Lubuksikaping.³

Pada tahun 2005, Kabupaten Pasaman lewat pilkada langsung dipimpin oleh Yusuf Lubus yang merupakan tokoh yang berasal dari Rao wilayah bagian utara Kabupaten Pasaman. Pada masa ini, ada kecenderungan gerak kemajuan Kota Lubuksikaping sedikit melambat karena diduga pembangunan fisik lebih banyak di arahkan di daerah Pasaman bagian Utara yang merupakan daerah asal Yusuf Lubis.

Pada pilkada tahun 2010, Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Bupati Benny Utama. Pada masa ini Kota Lubuksikaping terlihat semakin maju lagi, karena Benny Utama berasal dari Lubuksikaping sendiri. Indikasi bahwa Benny Utama telah mengarahkan pembangunan ke arah Kota Lubuksikaping dan sekitarnya dibandingkan ke arah bagian utara. Dengan demikian, peta politik di era otonomi di Kabupaten Pasaman telah ikut mempengaruhi perkembangan Kota Lubuksikaping khususnya dan Kabupaten Pasaman pada umumnya.

Kota ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan disebabkan karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman. Hal ini memicu

³ Surya Budhi, *Buku Info Pasaman tahun 2003*, (Lubuksikaping: Kepala Bagian HUMAS Setda Kabupatean Pasaman, 2003), hal. 18.

berkembangnya fungsi kota lainnya, seperti pusat pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan demikian Kota Lubuksikaping telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan selayaknya sebagai kota.

Dalam otonomi daerah dikenal adanya politik pembangunan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan petinggi daerah yaitu bupati. Hal ini dapat dilihat dalam memajukan perkembangan daerah berdasarkan tempat kelahiran. Secara otomatis, pusat pembangunan akan terfokus pada daerah pejabat yang bersangkutan, maka dari itu, perubahan pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman akibat pemekaran wilayah menjadi menarik untuk diteliti. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini berjudul **“Sejarah Kota Lubuksikaping Masa Otonomi Daerah (2000-2015)”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh batasan spasial, Kota Lubuksikaping. Sementara batasan temporalnya diambil dari tahun 2000-2015. Alasan tahun 2000 dijadikan batasan awal karena pada tahun tersebut merupakan tahun kepemimpinan Bupati Pasaman yaitu Baharuddin dan Wakil Bupati Banny Utama. Pada masa kepemimpinan Bupati tersebut dimulainya roda Otonomi Daerah di Kabupaten

Pasaman, dan kembali ke Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No. 9 tahun 2000.⁴

Tahun 2015 menjadi batasan akhir dari penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2015. Semenjak Benny Utama sebagai Bupati kehidupan Kota Pasaman semakin meningkat seperti adanya pembangunan infrastruktur, saluran hidranase, adanya taman kota, dan adanya pembangunan perumahan. Untuk membatasi ruang lingkup dalam pembahasan ini, maka perlu diajukan beberapa pertanyaan yang membatasi ruang lingkup penelitian ini.

1. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Lubuksikaping sebelum masa otonomi daerah ?
2. Bagaimana perkembangan pemerintahan nagari di kota dan sosial ekonomi daerah Kota Lubuksikaping ?
3. Bagaimanakah perkembangan fisik kota dan sosial ekonomi Kota Lubuksikaping pada masa otonomi daerah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kota Lubuksikaping sebelum masa otonomi daerah.

⁴ Pusat Pengajian Islam dan Minangkabau (ppim) Sumatra Barat. *Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pemerintah Nagari di Sumatra Barat* (Padang: Gunatama, 2004), hal. 332

2. Mengetahui keadaan perkembangan pemerintahan nagari di kota dan sosial ekonomi daerah Kota Lubuksikaping.
3. Mengetahui perkembangan fisik kota dan sosial ekonomi Kota Lubuksikaping pada masa otonomi daerah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Tulisan-tulisan yang membahas mengenai sejarah kota, diantaranya adalah tulisan dari Edi S. Ekadjati dengan judul "*Sejarah Kota Bandung 1945-1979*". Dalam tulisan ini, Edi S. menjelaskan mengenai perkembangan kedudukan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan berbagai tingkat yaitu kabupaten, kotamadya, keresidenan, dan provinsi dan dijelaskan bahwa Bandung merupakan kota perjuangan, baik sebelum Perang Dunia ke-2 maupun sesudahnya Orde Baru.⁵

Tulisan lain yaitu karya Parengkuan, dengan judul "*Sejarah Kota Manado 1945-1979*". Dalam tulisan ini membahas mengenai terbentuknya Keresidenan Manado pada tahun 1824 yang menjadikan Manado sebagai ibukota Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kota Manado mulai ditata oleh pemerintah kolonial agar mampu mendukung fungsinya sebagai pusat administrasi pemerintah keresidenan. Adanya Benteng Amsterdam dan letak kota yang sangat strategis didekat muara

⁵ Edi S. Ekadjati, "*Sejarah Kota Bandung 1945-1978*", Laporan Penelitian Proyek Inventasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1945/1985, (Jakarta: Depdikbud, 1985).

Sungai Tondano dan di dalam teluk Manado, dan dijadikan Kota Manado sebagai kota administratif pemerintahan kolonial.⁶

Selanjutnya, tulisan dari Susan Blackburn yang berjudul “*Sejarah Jakarta 400 Tahun*”. Dalam tulisan ini, Blackburn menjelaskan mengenai sejarah kota dan sosial masyarakat Jakarta sepanjang empat abad lebih, sejak masih bernama Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta. Selain fisik kota yang mengalami perubahan yang sangat pesat dan dibangun demi kenyamanan kaum elit Indonesia dan kepentingan warga miskin. Mayoritas penduduk kota dikesampingkan, komposisi etnik masyarakat Jakarta yang berpengaruh terhadap pembentukan kebudayaan perkotaan.⁷

Beberapa skripsi juga ada yang membahas mengenai sejarah kota yaitu skripsi Afiah Dharma dengan judul “*Sejarah Kota Batusangkar 1969-1989*”, Afiah menjelaskan mengenai perkembangan kota dilihat dari fisik maupun non fisik. Aspek fisik dapat dilihat dalam pertumbuhan dan perkembangan berbagai fasilitas di antaranya pertumbuhan dan perkembangan fasilitas ekonomi, pendidikan, dan pertumbuhan serta perkembangan berbagai fasilitas sosial lainnya. Aspek non fisik pertumbuhan dan perkembangan Kota Batusangkar terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama kehidupan ekonomi dan beragama.⁸

⁶FEW. Parengkuan, “*Sejarah Kota Manado 1945-1979*” Laporan Penelitian Proyek Inventasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1945/1985, (Jakarta: Depdikbud, 1986).

⁷Susan Blackburn “*Jakarta Sejarah 400 Tahun*” (Jakarta: Masup Jakarta, 2011).

⁸Afiah Dharma. “*Sejarah Kota Batusangkar 1969-1989*”. *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1995).

Skripsi Sardiyanto dengan judul “Sejarah Kota Sungai Penuh 1958-1995” menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh yang berkembang dari sektor perdagangan dan jasa, yang didukung oleh sektor pertanian dan perkembangan kota berawal dari perkembangan sektor pendidikan, ekonomi, transportasi dan perkembangan sektor lainnya.⁹

Sulastri dengan judul “Sejarah Kota Lubuksikaping 1979-1999” menjelaskan mengenai perkembangan Kota Lubuksikaping dari pemerintah nagari ke pemerintah desa dan menyebabkan perubahan struktur pemerintah yang ada, dan pada periode ini indikator pertumbuhan dan perkembangan Kota Lubuksikaping mengalami peningkatan yang cukup cepat.¹⁰

Selain itu Skripsi yang membahas mengenai kota yaitu tulisan Rifki Firdaus, mengenai “Perkembangan Kota Padang 1870-1945” dalam tulisan ini membahas mengenai Perkembangan kota Padang yang dilihat dari perkembangan fisik kota Padang dalam kurun waktu 1870-1945. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1870-1945 kota Padang sudah merupakan kota yang padat dilihat dari unsur fisiknya dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi.¹¹

⁹Sardiyanto. “Sejarah Kota Sungai Penuh 1958-1995”. *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1997).

¹⁰Sulastri. “Sejarah Kota Lubuksikaping 1979-1999”. *Skripsi*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2003).

¹¹Rifki Firdaus. “Sejarah Kota Padang 1870-1945”. *Skripsi*, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010).

Tulisan selanjutnya yaitu skripsi Jujun Kurniawan yang berjudul “Perkembangan kota Malang 1914-1942: Kajian Atas Intervensi Pemerintah Kolonian Hindia Belanda”, dalam tulisan ini menjelaskan mengenai penetapan kota Malang menjadi gemeente pada tahun 1914 menyebabkan munculnya suatu pemerintahan yang otonom dalam mengelola kotanya. Sistem politik saat itu dikendalikan oleh pemerintah colonial Belanda yang telah berlangsung berabad-abad. Dengan ditetapkan kota Malang sebagai kota otonom, pembangunan sarana dan prasarana semakin pesat.¹²

Tulisan-tulisan tersebut bisa menjadi suatu pedoman penulisan Sejarah Kota Lubuksikaping Masa Otonomi Daerah 2000-2015, yang jadi menarik dalam semua tulisan-tulisan tersebut belum ada yang membahas Sejarah Kota pada masa Reformasi. Penulis tertarik menulis mengenai Sejarah Kota Lubuksikaping pada masa otonomi daerah, dan yang membedakan tulisan ini dengan yang sudah ada adalah bahwa tulisan ini membahas mengenai perkembangan kota pada masa otonomi daerah yang belum ada dibuat oleh orang sebelumnya. Dan penulisan ini juga membahas bagaimana peranan putra lokal dalam pembangunan kota.

2. Kerangka Analisis

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang mencakup

¹² Jujun Kurniawan. “Perkembangan kota Malang 1914-1942: Kajian Atas Intervensi Pemerintah Kolonian Hindia Belanda”. *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2006).

berbagai konsep yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.¹³ Tulisan ini akan menguraikan tentang Perkembangan Kota Lubuksikaping Pada Masa Otonomi Daerah 2000-2015.

Kota Lubuksikaping yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu kawasan berdasarkan astronomis adalah mulai dari daerah Air Mangis sampai daerah Pintu Rimbo. Bahwa kota yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kota yang tidak termasuk dalam pengertian kota administratif, lubuksikaping hanyalah kota dari Kabupaten Pasaman. Kota yang penulis maksud adalah kota yang dalam pengertian sosiologis, yang artinya kota sebagai tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktifitasnya, pemusatan kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, pusat penyediaan fasilitas, industri, perdagangan modal dan lain-lain kegiatan yang dibutuhkan bagi penunjang dibelakangnya.¹⁴

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa konsep. *Pertama*, konsep kota merupakan daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan suatu kesatuan tempat kediaman. Menurut ahli, Mumford lebih melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan. Kota seperti magnet yang semakin kuat tarikannya baik bagi perekonomian maupun keagamaan. Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Hoekveld mengutarakan definisi kota dapat disoroti dari berbagai macam

¹³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 2.

¹⁴Sarapi Imam Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm 19-20.

perspektif, yakni antara lain perspektif morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi, dan sosial.¹⁵

Kedua, konsep sejarah kota. Konsep ini merupakan kajian sejarah kota menurut Kuntowijoyo mempelajari ekologi kota, transformasi sosial ekonomi, sistem sosial, problem sosial dan mobilitas sosial.¹⁶

Ketiga, konsep pemerintahan adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Perepublik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ *Keempat*, konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹⁸

Bergulirnya era desentralisasi pasca tumbangnya Orde Baru memberi ruang terselenggaranya pemerintahan daerah yang berkarakter lokal sesuai dengan aspirasi masyarakat dan keragaman daerah. Bagi Sumatra Barat era desentralisasi dijadikan momentum untuk kembali menata wilayah administrasi pemerintahan terendah. Nagari yang selama ini terkotak-kotak dalam sistem pemerintahan desa, kembali

¹⁵Wiwik Yulianingsih, *Sejarah Kota Mojokerto 1918-1942*, (penelitian Wiwik Yulianingsih Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Malang), hlm, 2-3

¹⁶Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Bentang, 2003, hlm. 64

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Wiwik, *Opcit.*, hlm. 2

disatukan dalam satu administrasi pemerintahan. Tidak ada lagi pemisahan secara tajam antara wilayah, masyarakat, hukum, adat, dengan wilayah pemerintahan, sebagaimana dahulu terjadi semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.¹⁹ Pemerintahan nagari yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.²⁰

Dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menganut asas desentralisasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun²¹ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.²²

Revolusi membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk biasa melayani perubahan tersebut.²³ Sistem nasional dan sistem

¹⁹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

²⁰Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²²Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, sejarah perkembangannya dan problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 95.

²³Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada1981), hlm. 19.

politik saling mempengaruhi antara satu sama lain. Melalui kebijaksanaan negara yang merupakan suatu kekuasaan, pemerintah pusat menciptakan suatu sistem politik yang akan memperkuat posisi sistem pemerintahan sehingga pada berikutnya akan dapat menetapkan kebijaksanaan politik yang akan menguatkan sistem politik nasional. Sistem pemerintahan lokal yang dipengaruhi, bahkan dibentuk oleh sistem pemerintahan dan politik pusat daerah.

Melalui pendekatan sistem politik, suatu masyarakat tidak dilihat hanya terdiri atas satu sistem politik saja, melainkan terdiri atas multisistem, atau pendekatan. Sistem ini bertolak dari konsepsi yang menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai macam proses. Misalnya, ada sistem ekonomi, sistem, sistem budaya, sistem kepercayaan, sistem teknologi, sistem politik, sistem politik yang menyangkut proses-proses dan kegiatan politik.²⁴

Selain pembahasan mengenai konsep politik pembangunan, tulisan ini juga menggunakan teori dari sejarah perkotaan, dan sejarah pemerintahan. Sejarah perkotaan ialah sejarah dari urbanisasi sebagai proses kemasyarakatan, proses urbanisasi tidak terjadi secara mendadak dan menyeluruh. Kota merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan berbagai macam kegiatannya yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.²⁵

²⁴Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Secara Teoretik dan Empirik*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Perda) hlm. 3-4.

²⁵Pamudji,S, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia Tinjauan Aspek Administrasi Pemerintahan*. (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm.3.

Sejarah pemerintahan secara luas berarti sistem pemerintahan yang berlaku itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintahan. Dalam tulisan ini, penulis ingin memaparkan tentang perubahan sistem pemerintahan di Kota Lubuksikaping.

E. Metode Penelitian dan Sumber Penulisan

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lampau yang terkait pada penelitian ilmiah. Dengan demikian untuk memperoleh sejarah ilmiah maka diperlukan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, karena objek dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa masa lampau.²⁶ Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu penelitian yang berusaha untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman masa lampau.²⁷ Agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik, maka diperlukan tahapan-tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang di dalamnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.²⁸

Langkah pertama adalah heuristik, yaitu mencari sumber atau mengumpulkan sumber seperti dokumen, bukti, arsip melalui studi pustaka. Pencarian ini dilakukan

²⁶Louis, Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995. Hlm. 18.

²⁷Kuntowijoyo. Loc.cit.

²⁸Helius Sjamsuddin, *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Ombak 2012, hlm. 13.

dengan cara mengunjungi Kantor Arsip Lubuksikaping, Kantor DPRD Pasaman, Perpustakaan Daerah Sumatra Barat, Kantor Statistik Kabupaten Pasaman, Kantor Statistik Provinsi Sumatra Barat, Perpustakaan pusat Universitas Andalas, Perpustakaan jurusan sejarah Universitas Andalas, dan perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Langkah kedua yaitu tahap kritik terdiri dari kritik eksteren tentang kredibilitas sumber dan kritik interen tentang keaslian sumber. Sumber primer yang sudah ada yaitu adanya Himpunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor: 16 Tahun 2001, Pasaman dalam angka dan Lubuksikaping Dalam Angaka, Sumber Primer juga diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari Pejabat formal dan non formal di antaranya Lubis dan mantan Bupati Pasaman periode 2010-2015 yaitu Benny Utama, dan beberapa staf pemerintahan dan beberapa tokoh yang berkaitan tentang penelitian ini.

Langkah ketiga yaitu tahap interpretasi, menerangkan dan mengelompokkan fakta sehingga mempunyai hubungan dan makna dalam bentuk penjelasan. Langkah keempat yaitu tahap historiografi atau penulisan sejarah yang menghasilkan sebuah karya sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini mencakup empat bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari sub-sub latar masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II membahas kondisi geografi, penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan Kota Lubuksikaping sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasaman pada masa sebelum otonomi daerah.

Bab III membahas tentang dinamika pemerintahan daerah, kondisi perkembangan fisik kota dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Lubuksikaping.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian.